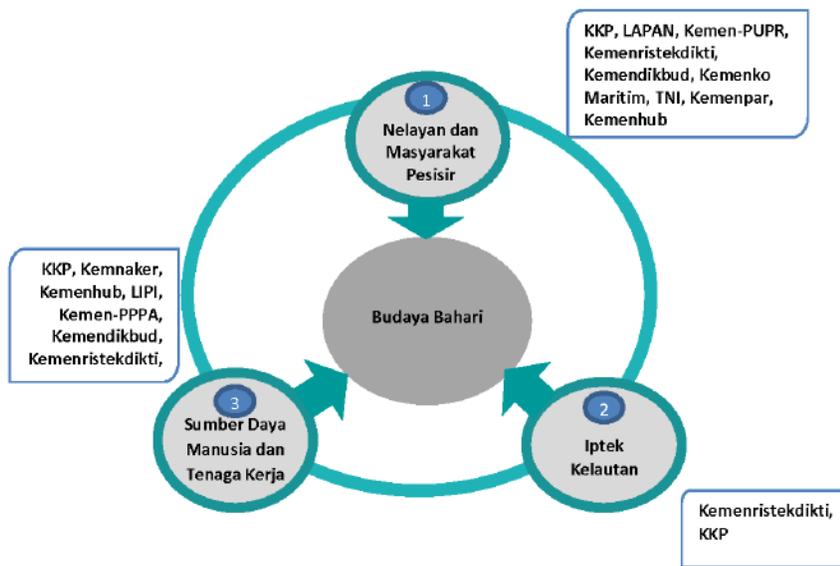


PROGRAM PRIORITAS E
BUDAYA BAHARI

PROGRAM PRIORITAS E
BUDAYA BAHARI

Program prioritas budaya bahari terdiri dari 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Nelayan dan Masyarakat Pesisir; (2) Iptek Kelautan; dan (3) Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja. Secara skematik, 3 (tiga) kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Isu dan Kondisi Saat ini

1. Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Nelayan merupakan pelaku penting dalam sektor perikanan. Jumlah Rumah Tangga Nelayan berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 sebanyak 864.485 Rumah Tangga atau mengalami penurunan sebanyak hampir 50% dalam kurun waktu 10 tahun. Total tenaga kerja di sektor perikanan berjumlah sekitar 13 juta orang, sebanyak 51% beraktivitas di produksi (perikanan tangkap dan budi daya), 38% di pemasaran dan hanya 11% di sektor pengolahan. Dengan demikian, komponen hulu (produksi) menjadi tumpuan dalam aktivitas mata pencaharian. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah tekanan terhadap lingkungan pesisir. Terdapat 12.827 desa pesisir (17%) yang langsung berbatasan dengan laut dan sampai

dengan tahun 2012 sebanyak 7,9 juta penduduk pesisir hidup masih berada di bawah garis kemiskinan. Angka ketimpangan penghasilan rumah tangga nelayan/ masyarakat pesisir cukup tinggi, diperkirakan dengan Indeks Gini sebesar 0,54 (Bappenas, 2015). Hal ini karena minimnya ketersediaan pelayanan dasar pada wilayah pesisir yang sulit dijangkau.

Persoalan yang sering muncul terkait nelayan antara lain keterbatasan keterampilan dan penguasaan teknologi, rendahnya akses terhadap modal produktif, rantai niaga yang merugikan, rendahnya penguasaan manajemen usaha, dan tidak adanya perlindungan sosial. Kondisi kemiskinan yang terus melekat pada nelayan menyebabkan terjadinya penurunan preferensi terhadap profesi nelayan. Untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan, diperlukan penguatan daya saing industri (sektor pengolahan) sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah produk, insentif program hilirisasi, serta skema pembiayaan yang berpihak pada nelayan dan pembudi daya. Nelayan dapat menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan perikanan (*co-management*), namun perlu didukung dengan penguatan kelembagaan nelayan (kelompok dan koperasi), pendampingan melalui penyuluh perikanan, serta pendidikan formal dan informal.

2. Iptek Kelautan

Iptek kelautan merupakan salah satu wahana yang harus dikuasai agar pendayagunaan potensi kelautan optimal. Inovasi teknologi kelautan merupakan keharusan untuk menjawab tantangan di dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara efektif dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya laut membutuhkan teknik yang semakin efisien, peralatan yang semakin maju, dan sumber daya manusia yang semakin terlatih. Penguasaan iptek erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang nantinya berperan sebagai pelaku utama inovasi dan juga sekaligus tenaga utama yang akan menggerakkan sektor kelautan.

Selain itu, perlu memberikan pembinaan sejak dini kepada generasi muda mengenai kelautan agar terpacu untuk mencintai laut dan lebih mudah mendalami ilmu kelautan. Untuk itu, kurikulum pendidikan kelautan perlu dimasukkan agar dapat memacu peningkatan iptek kelautan. Pemerintah perlu membangun dan memperluas lembaga penelitian dan perguruan tinggi di bidang kelautan. Di sisi lain, para

peneliti kelautan perlu didorong untuk menghasilkan inovasi baru yang penting bagi kemajuan bidang kelautan. Aktivitas riset yang diindikasikan melalui publikasi hasil riset terkait sumber daya kelautan masih sangat terbatas. Peneliti Indonesia maupun peneliti asing yang melakukan kegiatan riset terkait sumber daya kelautan Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah riset yang dilakukan di wilayah daratan. Saat ini riset kelautan masih belum terintegrasi dalam konsep pembangunan Riset Nasional. Selain itu, jejaring riset kelautan nasional yang melibatkan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku riset lainnya masih belum terbangun dengan baik. Begitu pula dengan infrastruktur pendukung riset dan survey kelautan, yang ketersediaannya masih rendah. Agenda kegiatan penelitian yang menggunakan kapal riset belum terpadu. Saat ini Indonesia baru memiliki 12 unit kapal riset yang tersebar di lima institusi.

3. Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2020-2030, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, di mana penduduk dengan umur produktif sangat besar, sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mendekati 70%. Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif akan mencapai sekitar 180 juta jiwa, sementara usia nonproduktif hanya 60 juta jiwa (BKKBN, 2013). Untuk itu perlu ditekankan supaya melimpahnya jumlah penduduk usia produktif bisa memberikan keuntungan optimal bagi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor ekonomi kelautan dan kemaritiman supaya menjadi lebih produktif dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Melimpahnya penduduk usia produktif yang tinggi akan berdampak positif apabila diimbangi dengan peningkatan produktivitas, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, saat ini mayoritas nelayan dan pembudi daya ikan Indonesia berpendidikan sekolah dasar, sehingga memerlukan berbagai program pendidikan dan pemberdayaan diantaranya melalui pendampingan yang intensif dari penyuluh perikanan terkait peningkatan keterampilan maupun diseminasi teknologi yang efisien dan efektif. Selanjutnya, masih dibutuhkan jumlah tenaga kerja kepelautan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, yang semakin meningkat, termasuk kebutuhan sumber daya manusia kepelabuhanan untuk pelabuhan umum, pelabuhan khusus, dan

pelabuhan perikanan. Permasalahan lainnya terkait sumber daya manusia adalah masih terbatasnya sertifikasi kompetensi bagi anak buah kapal dan nahkoda.

Secara rinci, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 untuk program prioritas budaya bahari, dapat dilihat pada matriks berikut: